

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 bahwa

Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2020 diarahkan pada tema: : **“Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mendasarkan pada tema RKPD Tahun 2021, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
7. Kualitas pendidikan meningkat
8. Harapan hidup masyarakat meningkat
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat
12. Infrastruktur wilayah meningkat
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11) ;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2021 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2021.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2021.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, keterkaitan antara Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan dokumen lainnya, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang peraturan – peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, serta garis besar isi dokumen

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan output dan outcome yang diinginkan.

### BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan terlampir dalam Tabel 2.1)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut.



### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

#### 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

**2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

**3. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

**4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
- b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

**5. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :**

- a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
  - 1) pengaturan zonasi;
  - 2) perizinan;
  - 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - 4) pengenaan sanksi.

**6. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang;  
dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	81,97
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	100

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah :

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	79,60%

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

## Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan</b>	Kel. Pakuncen	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Sorosutan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Ngampilan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2021 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada SKPD tidak hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang semakin tinggi.
2. Administrasi pertanahan yang semakin tertib.

##### **3.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.
2. Tertib administrasi pertanahan meningkat

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	70,45
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	97,73

#### Indikator Kinerja Tahunan 2021

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	70,45
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	97,73

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2021. Program kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri dari :
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - c. Kegiatan Adminstrasi Umum
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; terdiri dari :
  - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Rinci (RTRR).
  - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah.
  - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah.
  - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
3. Program Pengelolaan Izin Lokasi; terdiri dari Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah.
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; terdiri dari Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; terdiri dari Kegiatan Penyelesaian Masalah/Sengketa Tanah.
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong; terdiri dari Kegiatan Penatausahaan Tanah.
7. Program Penatagunaan Tanah; terdiri dari Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp.14.915.787.980,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta,

2020

Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta  
Asisten Umum

Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd  
NIP. 19610605 198401 1 005

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Daerah tahun 2019(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	79,40%	61,40%	72,00%	72,00%	100%	79,40%		
5.	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	61,75%	50,25%	56,50%	56,50%	100%	61,75%		
6.	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase penerbitan tanah aset pemkot.	96,89%	91,80%	94,82%	96,11%	101%	96,89%		
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	96,89%	93,60%	95,34%	95,53%	100%	96,89%		

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>I</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>														
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.			47,9	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97	47,9	55,83	64,25			
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			30,07	92,41	95,00	96,86	98,79	100	30,07	92,41	95,91			
<b>II</b>	<b>Indikator Program :</b>														
1	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang			52,30%	61,40%	72,00%	79,40%	86,50%	88,48%	52,30%	61,40%	72,00%			
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang			43,50%	50,25%	56,50%	61,75%	68,00%	75,45%	43,50%	50,25%	56,50%			
3	Persentase penerbitan tanah aset pemkot.			29,40%	91,80%	94,82%	96,89%	98,96%	100%	29,40%	91,80%	96,11%			
4	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.			31,38%	93,60%	95,34%	96,89%	98,45%	100%	31,38%	93,60%	95,53%			

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2021  
Kota Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan		
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.108.891.736	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5.108.891.736		
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	19.750.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	19.750.000		
1.2	Administrasi Keuangan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.266.325.844	Administrasi Keuangan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.266.325.844		
1.3	Administrasi Umum	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	822.815.892	Administrasi Umum	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	822.815.892		
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	70,45%	2.284.771.800	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	70,45%	2.284.771.800		
2.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	449.100.180	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	449.100.180		
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota	100%	922.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota	100%	922.400.000		
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	100%	675.671.620	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	100%	675.671.620		
2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	237.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	237.600.000		
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	97,73%	7.522.124.444	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	97,73%	7.522.124.444		

	<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>				10.785.000					10.785.000
3.1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terwujudnya tertib administrasi pengendalian pertanahan	100%	10.785.000				100%	10.785.000
<b>4</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>				<b>6.113.897.040</b>					<b>6.113.897.040</b>
4.1	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Lokasi	6.113.897.040				3 Lokasi	6.113.897.040
<b>5</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>				<b>273.535.000</b>					<b>273.535.000</b>
5.1	Inventarisasi sengketa, konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status hukum pertanahan	100%	148.535.000				100%	148.535.000
5.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status hukum pertanahan	100%	125.000.000				100%	125.000.000
<b>6</b>	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>				<b>378.964.820</b>					<b>378.964.820</b>
6.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	378.964.820				100%	378.964.820
<b>7</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>				<b>744.942.584</b>					<b>744.942.584</b>
7.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	744.942.584				100%	744.942.584
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>14.915.787.980</b>					<b>14.915.787.980</b>











Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai, Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					5,108,891,736	5,619,760,909		Sekretaris Dinas	
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,750,000	21,725,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021.	2 Dokumen			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,075,000	3,382,500		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Pengelolaan Website OPD	12 bulan			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	9,475,000	10,422,500		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Penyusunan Buku Profil OPD	1 Buku			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	1,750,000	1,925,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah.	1 Dokumen			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	2,250,000	2,475,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,266,325,844	4,692,958,428	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN			Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	4,239,850,844	4,663,835,928		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen			Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen			Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	5,800,000	6,380,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen			Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,850,000	2,035,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD







2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	100%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	1 Dokumen	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	148,535,000	163,388,500	Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	APBD
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	100%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	1 Dokumen	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	273,535,000	300,888,500	Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	DAIS
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	98,45%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	25 Rekomendasi	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	125,000,000	137,500,000	Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	DAIS
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,45%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	25 Rekomendasi	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	6,113,897,040	6,725,286,744	Ka. Bidang Pertanahan	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,96%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	3 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	6,113,897,040	6,725,286,744	Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	APBD
2.10.05.2.01.02	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,96%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	3 Dokumen	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	6,113,897,040	6,725,286,744	Ka. Bidang Pertanahan	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,96%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	3 Dokumen	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	378,964,820	416,861,302	Ka. Bidang Pertanahan	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,96%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	3 Dokumen	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	378,964,820	416,861,302	Ka. Bidang Pertanahan	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kota Yogyakarta	Tertib administrasi pertanahan meningkat	98,96%	Penanganan Permasalahan Pertanahan.	10 Bidang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	134,964,820	148,461,302	Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan	APBD
							5 Bidang						
							25 Bidang						
							1 Dokumen						

